

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT TAHUN 2025

HUBUNGI KAMI:



inspektorat.bkn@gmail.com
inspektorat@bkn.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Maksud dan Tujuan	5
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Tujuan	9
2.3 Sasaran Kegiatan	9
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2024	12
 BAB III. RENCANA KERJA	 30
3.1 Target Kinerja 2025	30
3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025	49
 BAB IV. PENUTUP	 52
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas penyusunan “Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025”. Rencana Kerja Inspektorat ini merupakan proses penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan dinamis memungkinkan Rencana Kerja tahunan yang telah disusun akan menghadapi berbagai hambatan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan adanya perubahan atau revisi, Rencana Kerja Inspektorat yang telah ditetapkan ini, diharapkan dapat menjadi acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat. Namun demikian kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini mungkin belum sempurna, oleh karena itu hendaknya ketidaksempurnaan tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Demikian dan semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat khususnya maupun bagi BKN pada umumnya.

Jakarta, 6 Oktober 2025

Inspektur,

 Ditandatangani Secara Elektronik
Dedi Herdi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu rangkaian dari siklus dan akuntabilitas kinerja yang berawal dari perencanaan dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sekaligus merupakan rencana tahunan Inspektorat BKN yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, karena Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja dari kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* dituangkan dalam suatu dokumen sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Sumber-sumber keuangan untuk seluruh kegiatan Inspektorat tahun 2025 direncanakan berjumlah *Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)*

Inspektorat pada tahun 2025 merencanakan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani pada 29 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat
2. Skor Evaluasi AKIP Inspektorat
3. Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat
4. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Inspektorat
5. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Inspektorat
6. Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti
7. Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN

8. Level Kapabilitas APIP
9. Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat
10. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat
11. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sedang dan akan terus terjadi, setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka, transparan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap organisasi publik perlu merumuskan Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dari tugas dan fungsi setiap lembaga kepada *stakeholdernya*.

Inspektorat di dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Renstra Inspektorat Tahun 2025 - 2029, sehingga program dan kegiatan lebih terfokus dan mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini terdiri atas beberapa bagian antara lain berisikan ringkasan dari Renstra dan penjabaran lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan pencapaiannya.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 ini disusun berdasarkan visi misi BKN dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya yang akan diuraikan dalam bab ini adalah visi dan misi BKN, nilai-nilai organisasi BKN, serta tugas dan fungsi Inspektorat.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

1.3. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKN dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

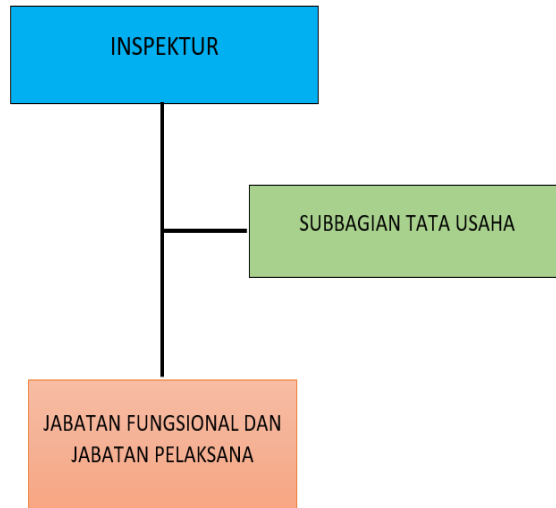
- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Berikut adalah struktur organisasi dan profil sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat BKN per Juli 2025:

Gambar. 1
Struktur Organisasi Inspektorat BKN



Tabel. 1.
Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN
Per Juli 2025

No	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Inspektur	1	1,96%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1,96%
3	Auditor Madya	7	13,73%
4	Auditor Muda	3	5,88%

5	Auditor Pertama	15	29,41%
6	Auditor Penyelia	1	1,96%
7	Auditor Mahir	3	5,88%
8	Auditor Terampil	5	9,80%
9	Penelaah Teknis Kebijakan	2	3,92%
10	Pengadministrasi Perkantoran	1	1,96%
11	Arsiparis Terampil	1	1,96%
12	CPNS Auditor Ahli Pertama	4	7,84%
13	CPNS Auditor Terampil	7	13,73%
Total		51	100%

Dari tabel di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dimana jabatan Auditor Pertama merupakan yang terbanyak diisi yaitu lima belas orang atau 29.41% dari total pegawai.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Inspektorat sepanjang tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur dan mewujudkan akuntabilitas kinerja sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Visi dan Misi

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 mengacu dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan ke Rencana Strategis Inspektorat tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara

2.1.1 Visi Badan Kepegawaian Negara

Dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, bidang tugas BKN berkaitan dengan agenda Transformasi Tata Kelola. Untuk itu, rumusan visi BKN perlu mempertimbangkan agenda transformasi tersebut khususnya pada Tahap 1 (2025-2029). Agenda-agenda pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJPN pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Negara Nusantara: negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- 2) Berdaulat: Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya;
- 3) Maju: Ekonomi Indonesia mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara, Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil; dan

- 4) Berkelanjutan: sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan analisis lingkungan strategis BKN yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka rancangan rumusan visi BKN tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya meritokrasi dan profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan [rumusan visi Presiden]”

Rumusan visi tersebut di atas mengandung makna:

- a. Meritokrasi merupakan prinsip yang mendasari manajemen ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan berpijak kepada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus; dan
- b. Profesionalitas meliputi keunggulan dalam kompetensi, komitmen, dan kesejahteraan ASN secara utuh yang mewujudkan pada pencapaian kinerja individu dan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

2.1.2 Misi Badan Kepegawaian Negara

Selanjutnya misi BKN mempertimbangkan ketentuan tugas dan fungsi pemerintahan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi “perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen

ASN”. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Ketentuan Penutup Pasal 70 ayat (2) yaitu “Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c”. Selain itu, dalam perkembangannya, tugas dan fungsi pemerintahan yang ada pada Pasal 26 ayat (2) huruf d, yaitu “pengawasan penerapan sistem merit” juga diproyeksikan akan diserahkan kepada BKN.

Dengan pertimbangan tersebut, maka rancangan rumusan misi BKN untuk mendukung visi BKN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi; dan
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Rumusan misi di atas memberikan panduan terkait orientasi strategi yang akan dijalankan oleh BKN dalam kurun waktu 2025-2029, dengan penjabaran sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi.

BKN menjadi salah satu aktor utama dalam manajemen ASN terutama pada level koordinasi di tingkat teknis untuk memastikan sistem merit dalam manajemen ASN terlaksana dengan baik. Hal ini dimanifestasikan dalam beberapa peran. Pertama, perumusan kebijakan teknis, yaitu kebijakan berupa standar, prosedur, dan kriteria teknis yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam menjalankan prinsip dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh undang-undang, Presiden, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua, pembinaan dalam rangka memastikan para pembina kepegawaian di instansi pemerintah memahami dan mampu

menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang manajemen ASN. Ketiga, BKN sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dari para pembina kepegawaian di instansi pemerintah menjalankan peran advokasi atas prinsip dan kebijakan manajemen ASN, termasuk netralitas ASN dan depolitisasi birokrasi, kepada para pejabat pembina kepegawaian. Keempat, dalam hal teknis administratif kepegawaian, BKN sebagai simpul (hub) manajemen ASN memberikan layanan administrasi kepegawaian yang cepat dan valid berbasis digitalisasi. Kelima, penjaminan kualitas meritokrasi dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian atas penerapan norma dasar dan standar manajemen ASN, penerapan sistem merit, dan nilai dasar ASN.

Misi 2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Perwujudan visi BKN tidak akan terjadi tanpa penguatan kelembagaan dan governansi BKN. Sebagai prime mover dalam transformasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi, BKN dituntut menjadi yang teladan dalam manajemen ASN dan reformasi birokrasi.

2.2. Tujuan

Beranjak dari rumusan visi dan misi BKN 2025-2029 sebagaimana dijabarkan di atas, maka rumusan tujuan Inspektorat 2025-2029 yaitu menjalankan peran sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) serta *consulting* (pendampingan konsultasi) dalam memastikan setiap program di lingkungan Badan Kepegawaian Negara berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang selanjutnya disebut SK merupakan target terukur dan spesifik yang ingin dicapai dari suatu kegiatan untuk mendukung tujuan program, serta mencerminkan hasil (*outcome*) dari berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Penyusunan sasaran kegiatan menggunakan metode

Balanced Scorecard, yang selanjutnya disingkat BSC, adalah suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional. Sasaran Kegiatan Inspektorat yang keseluruhannya termasuk di dalam *Learning and Growth perspective* untuk mendukung tercapainya sasaran strategis BKN dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah sebagai berikut:

SK1 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN, yang terdiri atas:

IKK1 Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

IKK 2 Skor Evaluasi AKIP Inspektorat

IKK 3 Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat

IKK 4 Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Inspektorat

SK 2 Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah, yang terdiri atas:

IKK 5 Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Inspektorat

SK 2 Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN, yang terdiri atas:

IKK 6 Persentase Hasil Pengawasan Internal yang di tindaklanjuti

IKK 7 Hasil penilaian penjamin kualitas level maturitas SPIP BKN

IKK 8 Level Kapabilitas APIP

IKK 9 Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat

SK 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN, yang terdiri atas;

IKK 10 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat

IKK 11 Rasio temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat

Pada tanggal 15 Januari 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Inspektorat yang terdiri dari 3 SK dan diturunkan ke dalam 7 IKK seperti gambar di bawah:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87
		IKK.2	Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat	73
SK.2	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	IKK.3	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	89.4
		IKK.4	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	4
		IKK.5	Level Kapabilitas APIP	3
SK.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.6	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat	99
		IKK.7	Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Inspektorat	100

Kemudian setelah adanya pelantikan Kepala BKN dan disahkannya SOTK yang baru, dilakukan penandatanganan kembali atas PK Tahun 2025 yang terbaru pada tanggal 29 Juli 2025. Terdapat perubahan berupa penambahan IKK – IKK baru yang sebelumnya tidak ada di PK awal tahun dan perubahan narasi pada beberapa IKK. Berikut adalah PK Inspektorat yang tertandatangani pada tanggal 29 Juli 2025 pasca perubahan SOTK:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87
		IKK.2	Skor Evaluasi AKIP Inspektorat	73
		IKK.3	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat	100
		IKK.4	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Inspektorat	90
SK.2	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah	IKK.5	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Inspektorat	100
SK.3	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	IKK.6	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang di tindaklanjuti	89.4
		IKK.7	Hasil penilaian penjamin kualitas level maturitas SPIP BKN	4
		IKK.8	Level Kapabilitas APIP	3
		IKK.9	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat	1
		IKK.10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat	99
SK.4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.11	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat	0

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2024

IKU.1. Level Maturitas SPIP

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Level Maturitas SPIP	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	75%	75%

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluator BPKP, menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,351 dan pada tahun 2024 berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP

menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,520. Sehingga berdasarkan skor yang diperoleh terdapat kenaikan nilai SPIP dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 0,169. Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.1 tahun 2024 yaitu 75% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 4 namun realisasi kinerja yang diperoleh berada level 3.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Level Maturitas SPIP tahun 2024 diantaranya yaitu:

1. Dikarenakan Server Pusat Data Nasional mengalami eror pada pertengahan bulan Juni 2024 sehingga berdampak juga pada eror aplikasi e-integrity tidak dapat diakses maka pengisian kertas kerja yang seharusnya diisi ke dalam aplikasi dialihkan menjadi ke kertas kerja manual dalam spreadsheet;
2. Pelaksanaan penilaian mandiri satker masih belum berjalan efektif;
3. BKN belum menerapkan *three lines of defence* dengan tepat yaitu pada lini kedua belum berjalan dengan optimal. Misalnya, belum terdapat Unit Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proses bisnis pada unit kerja/satuan kerja (lini pertama) baik dalam sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko;
4. Dalam penyusunan profil risiko, risiko strategis organisasi dan risiko korupsi belum diidentifikasi. Dimana kondisi saat ini seluruh Unit Pemilik Risiko dalam menyusun identifikasi risiko masih terfokus pada risiko operasional.

Rekomendasi dan perbaikan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja antara lain:

1. Percepatan pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti dukung beserta penyampaian surat permohonan evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN kepada Tim Evaluator BPKP sesuai batas waktu yang ditetapkan;
2. Mengoptimalkan satker untuk melaksanakan penilaian mandiri dengan menyelenggarakan bimbingan teknis yang direncanakan pada tahun 2025;
3. Perlu dibentuk Unit Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proses bisnis pada unit kerja/satuan kerja (lini pertama) baik dalam sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko.
4. Perlu dilakukan perubahan pedoman manajemen risiko dalam menguraikan kategori risiko korupsi serta menambahkan proses penerapan manajemen risiko berupa komunikasi dan konsultasi.

IKU.2. Level Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%

Berdasarkan hasil koordinasi dengan tim evaluator BPKP, dikarenakan evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP atas tahun 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 sehingga kapabilitas APIP Tahun 2024 sementara berada pada “Level 3” dengan skor “3,44” untuk seluruh

elemen kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP195/D205/2/2023 Tanggal 28 Desember 2023.

Sehingga tidak terdapat kenaikan skor kapabilitas APIP dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.2 tahun 2024 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 3 dan realisasi kinerja yang diperoleh adalah level 3.

Adapun hal yang telah dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah:

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPKP terkait monitoring dan evaluasi Area of Improvement (AoI) atas penilaian tahun 2023. Pada aspek program penjaminan dan peningkatan kualitas yang menjadi poin perbaikan evaluasi yakni menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala atas pedoman yang telah digunakan sebagai panduan pelaksanaan pengawasan seperti penyusunan Pedoman Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus/Investigasi, atau melakukan evaluasi perbaikan pedoman pemberian jasa konsultansi dan lain sebagainya;
2. Pada tanggal 26 September 2024 telah dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer serta Risiko dan Pengendalian Teknologi Informasi dengan narasumber 1 Auditor dan dihadiri 34 Auditor Inspektorat BKN;
3. Telah menerbitkan Piagam Pengawasan Intern dan disahkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara. Adapun Piagam Pengawasan Intern dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Badan Kepegawaian Negara untuk mengevaluasi kegiatan APIP;
4. Telah dilakukan persiapan pelaksanaan TSI dan TSE di tahun 2025;

5. Melakukan tindak lanjut AoI atas Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP 2023; dan
6. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer serta Risiko dan Pengendalian Teknologi Informasi dengan narasumber 1 Auditor dan dihadiri 34 Auditor Inspektorat BKN; dan
7. Menyusun draf pedoman audit investigasi, disertai dengan melaksanakan FGD Penyusunan Draft Pedoman Audit Investigasi secara daring pada tanggal 6 Desember 2024 dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri oleh seluruh Auditor Inspektorat.

Hambatan yang ditemui diantaranya yaitu belum dilakukan koordinasi secara efektif dengan BPKP terhadap pemenuhan eviden Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 2024 serta APIP belum secara keseluruhan melakukan pembaharuan data. Sehingga upaya perbaikan yang dilakukan yakni melakukan koordinasi secara efektif dengan BPKP, melakukan pembaharuan data yang disesuaikan dengan peraturan/kebijakan terbaru, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, Tim Level Kapabilitas APIP BKN mendapat jadwal evaluasi untuk hasil penilaian Level Kapabilitas APIP BKN oleh Tim Evaluator BPKP pada tahun 2025, sehingga tindak lanjut yang dilakukan yakni Tim Level Kapabilitas APIP BKN melakukan koordinasi secara berkala dengan Tim Evaluator BPKP agar penilaian mandiri kapabilitas APIP dapat terlaksana di tahun 2025.

IKU.3. Indeks Kepuasan Unit Kerja Inspektorat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Unit Kerja Inspektorat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	85	85	88	88.5	94	83,75	87,75	86,53	88,14	87,07	92,63%	92,63%

Pada Triwulan IV tahun 2024 telah diterbitkan dan disampaikan ke seluruh satuan kerja Nota Dinas nomor: 227/PR.06.01/ND/H/2024 tentang Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan Inspektorat periode Semester II Tahun 2024, pada Nota Dinas berisi tautan survei ditujukan untuk diisi oleh pengguna jasa Inspektorat yakni auditee di seluruh satuan kerja Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester I Tahun 2024 disampaikan bahwa survei diisi 136 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan dengan Nilai Interval 3,47, Nilai Interval Konversi 86,76, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik). Adapun pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester II Tahun 2024 disampaikan bahwa survei diisi 175 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan dengan Nilai Interval 3,48, Nilai Interval Konversi 87,07, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik).

Berdasarkan hasil pengolahan data dari responden survei diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat diketahui bahwa nilai terkecil berada di unsur 3 dengan skor 3,39 yaitu “Waktu Penyelesaian”. Hal ini menjadi catatan bagi Inspektorat agar Pelayanan yang diberikan

dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sementara nilai tertinggi ada pada unsur 4 dengan skor 3,73, yaitu “Biaya Tarif”. Hal ini menjadi poin positif yang harus dipertahankan bahwa Pelayanan yang diberikan Inspektorat gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Dibandingkan hasil survei Tahun 2023 dengan nilai 88,14 dan hasil survei Tahun 2024 dengan nilai 87,07 dimana mengalami penurunan sebesar 1,07 poin. Adapun capaian kinerja IKU.3 tahun 2024 yaitu 92,63% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada nilai 94 namun realisasi kinerja yang diperoleh adalah 87,07.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan terlihat dari nilai terkecil pada unsur survei dengan skor 3,39 yaitu “Waktu Penyelesaian”. Waktu penyelesaian berkenaan dengan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan layanan Inspektorat adalah meningkatkan pelayanan yang diberikan Inspektorat agar lebih tepat waktu serta memperbaharui SOP yang berlaku di lingkungan Inspektorat agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan dapat dipahami seluruh pengguna layanan Inspektorat.

IKU.4. Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN

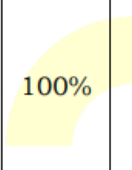
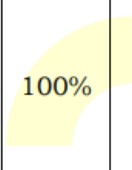
Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	100%	100%

Selama tahun 2024 capaian yang telah dilakukan yaitu penyusunan draf pedoman Audit Investigasi dimana sesuai dengan formula pada manual IKU Inspektorat Tahun 2024 yaitu 1 (satu) draf pedoman Audit Investigasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.4 tahun 2024 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah 1 draf pedoman dengan realisasi telah menyelesaikan 1 draf pedoman.

Dalam proses menyusun draf pedoman audit investigasi selain melakukan diskusi di dalam internal tim juga telah dilakukan *Focus Group Discussion* Penyusunan Draft Pedoman Audit Investigasi secara daring pada tanggal 6 Desember 2024 dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri oleh seluruh Auditor Inspektorat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan draf pedoman Audit Investigasi yaitu menyesuaikan isi pedoman dengan kebijakan yang ada, sehingga tindak lanjut yang akan dikerjakan yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut pada periode semester I Tahun 2025.

IKU.5. Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	 100%	 100%

Pada Tahun 2024, jumlah pengaduan melalui WBS maupun pengaduan langsung (termasuk e-LAPOR) yang masuk ke Inspektorat BKN sebanyak 109 (seratus sembilan) pengaduan, Data tersebut diperoleh dari Laporan Monitoring Pelaksanaan dan Penanganan WBS yang disampaikan oleh Tim WBS periode bulan Januari sampai dengan November 2024 sedangkan pelaporan periode Desember 2024 akan diterbitkan pada bulan Januari 2025 hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Dari total 109 (seratus sembilan) pengaduan tersebut sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) sudah selesai diproses dan sisa 10 (sepuluh) pengaduan masih proses ditindaklanjuti oleh tim WBS dengan rincian sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) pengaduan melalui WBS dan sebanyak 12 (dua belas) pengaduan langsung termasuk melalui e-LAPOR. Sehingga persentase penyelesaian pengaduan tahun 2024 berdasarkan formula manual IKU yaitu $(109/109) \times 100\% = 100\%$. Diperoleh capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat satker yang menyampaikan laporan wbs tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan pada setiap periode pengumpulan laporan. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan yaitu berkoordinasi dan mengingatkan secara berkala penanggung jawab yang menyampaikan laporan wbs setiap satker.

IKU.6. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	101%

Pada tahun 2024, Inspektorat menyusun kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. Inspektorat merencanakan 67 (enam puluh tujuh) kegiatan dengan rincian 5 (lima) kegiatan pre audit, 11 (sebelas) kegiatan audit, 10 (sepuluh) kegiatan Reviu, 21 (dua puluh satu) kegiatan evaluasi, serta 21 (dua puluh satu) kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dimana saat ini ada sebanyak 36 Auditor dari total kebutuhan 90 Auditor sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 54 Auditor berdasarkan penetapan peta jabatan pada Keputusan Kepala Nomor 150.1 tahun 2022, Inspektorat berhasil mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan. Dari 67 kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan yang direncanakan pada PKPT 2024 Inspektorat telah melaksanakan 68 kegiatan dengan 1 tambahan di luar PKPT 2024 yaitu Audit Operasional Kantor Regional XII BKN Banda Aceh periode Januari - Juni 2024. Sepanjang tahun 2024 Inspektorat juga melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan disiplin pegawai. Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pada tahun 2024 sesuai formula pada manual IKU yaitu $(68/67) \times 100\% = 101\%$. Maka diperoleh capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 101% dari target 100%.

IKU.7. Persentase Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	92.11%	92.11%	92.11%

Pada Tahun 2024 telah disampaikan Nota Dinas Nomor: 006/AI.06/ND/H/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Penyampaian Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK s.d. Semester II TA 2024 dan Nota Dinas Nomor: 015/AI.01/ND/H/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Penyampaian Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi Inspektorat s.d Semester II Tahun 2024 kepada unit kerja terkait. Adapun kendala yang dihadapi yaitu Auditi menghadapi keterbatasan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut yang efektif. Sehingga upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat adalah dengan membentuk tim pembinaan dan pendampingan pengelolaan anggaran dan kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dimana Auditi dapat berkonsultasi kendala yang dihadapi terkait pengelolaan anggaran dan kinerja dengan tim pembinaan dan pendampingan masing-masing sesuai yang tertera dalam Keputusan Sekretaris Utama Nomor 7.1 Tahun 2024.

Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Tahun 2020-2024 BKN berdasarkan ST Pengawasan Tahun 2024 diperoleh persentase capaian $75/80 \times 100\% = 93.75\%$ untuk tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Adapun untuk Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun LHP 2022-2024 diperoleh persentase capaian $152/168 \times 100\% = 90.48\%$ untuk

tindak lanjut rekomendasi BPK. Maka capaian kinerja IKU.7 adalah $93.75\% + 90.48\% / 2 = 92.11\%$. Terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari 93% menjadi 92.11% dengan penurunan sebesar 0.89%.

IKU.8. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	80	80	81	81	81	n/a	79,81	73,86	74,75	83,29	102,83%	102,83%

Berdasarkan Surat Biro Sumber Daya Manusia Nomor: 3/BKP.05.02/SD/A.II/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 atas Dasar Penilaian Tahun 2023, Inspektorat memperoleh nilai sebesar 83,29 melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 81. Dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar 74,75 terdapat peningkatan nilai menjadi sebesar 83,29 (naik 8,54), dengan kenaikan yang signifikan tersebut IP ASN Inspektorat termasuk dalam kategori tinggi.

Pada tahun 2024, sebagai upaya mencapai target Indeks Profesionalitas dan peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat maka pegawai di lingkungan Inspektorat telah berperan aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan baik yang diselenggarakan oleh internal BKN maupun dari eksternal BKN dengan berbagai jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai.

IKU. 9. Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat sudah dimanfaatkan secara optimal sehingga memenuhi target capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100%. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi telah dibuat Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat tahun 2004.

IKU.10. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat	36	36	36	36	100%	36	33,64	32,67	n/a	100%	100%	100%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2023 mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Terbitnya peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh Arahan

Presiden tentang RB berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agilebureaucracy). Berkenaan dengan tersebut, perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada seluruh unit kerja baik Eselon I maupun II di lingkungan BKN Pusat serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN.

Adapun perubahan narasi semula "Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat" menjadi "Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkungan Inspektorat". Dikarenakan perubahan peraturan tersebut sehingga untuk nilai pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat tahun 2023 tidak dapat dimunculkan dan tidak dapat dibandingkan dengan persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, tim Reformasi Birokrasi Inspektorat telah melaksanakan 15 kegiatan dari 15 kegiatan yang disusun pada dokumen Rencana Aksi. Sehingga target pada Tahun 2024 yaitu $15/15 \times 100\% = 100\%$. Maka capaian kinerja pada tahun 2024 untuk IKU 10 diperoleh 100%.

IKU.11. Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN	75	75	75	75	75	72,41	72,69	75,80	69,25	71,25	95%	95%

Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN tahun 2024 berdasarkan penilaian Tim Evaluasi SAKIP BKN yang disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat BKN Nomor 071/AI.03/LHE/H/2024 tanggal 26 Agustus 2024, memperoleh nilai sebesar 71.25 (tujuh puluh satu koma dua puluh lima) dengan kategori BB (Sangat Baik – Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator).

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN telah diterbitkan pada Triwulan III tahun 2024, dengan target skor 75 dan realisasi skor yang diperoleh 71.25, sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 diperoleh $71.25/75 \times 100\% = 95.00\%$. Meskipun masih belum berhasil mencapai skor yang ditargetkan, terdapat kenaikan skor dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari skor 69,25 ke skor 71,25 (naik 2,00). Telah diterbitkan pula dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam penilaian skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN seperti Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020-2024, Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024, Manual IKU Inspektorat tahun 2024, Rencana Aksi Inspektorat tahun 2024, Laporan Kinerja Triwulan, maupun Laporan NPSS.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada IKU. 11 diantaranya yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja belum disusun sepenuhnya selaras, apabila terdapat perbedaan indikator kinerja (IKU) maupun target antara dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dengan Penetapan

Kinerja (PK) belum disampaikan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) secara berkelanjutan selama periode Renstra;

2. Masih terdapat formulasi perhitungan IKU pada Manual IKU yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja baik rencana aksi maupun NPSS belum menjelaskan rekomendasi dan perbaikan secara selaras dengan permasalahan/kendala yang dihadapi pada seluruh capaian Indikator Kinerja Utama.

Rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan oleh Inspektorat diantaranya yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja agar disusun secara selaras, apabila terdapat perbedaan indikator kinerja (IKU) maupun target antara dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dengan Penetapan Kinerja (Perkin) untuk mencantumkan penjelasan penyebab adanya perubahan tersebut pada dokumen Rencana Kerja (Renja) secara berkelanjutan selama periode Renstra;
2. Melakukan revidi dokumen Manual IKU terkait formulasi perhitungan IKU agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat diyakini akuntabilitasnya; dan
3. Dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja unit baik rencana aksi maupun NPSS agar membuat rekomendasi dan perbaikan selaras dengan permasalahan/kendala yang dihadapi pada seluruh capaian Indikator Kinerja Utama.

IKU.12. Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat	98%	98%	100%	100%	100%	92,47%	99,99%	99,93%	98,29%	99,92%	99,92%	99,92%

Pada tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana aksi dengan akumulasi realisasi anggaran dari pagu anggaran setelah blokir yaitu berada pada persentase 99,92% sebesar Rp 1.016.696.514 (satu milyar enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp803.486 (delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) atau 0,08%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta transportasi lokal.

Dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 pada 98,29% terdapat peningkatan persentase realisasi anggaran tahun 2024 menjadi 99,92% (naik 1,63). Secara keseluruhan anggaran dapat terserap dengan optimal karena kegiatan di unit kerja dimonitoring secara berkala dan apabila terdapat perubahan kegiatan pada tahun berjalan maka pengelola segera mengajukan revisi POK sehingga penyerapan bisa dimaksimalkan.

IKU.13. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tidak terdapat temuan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Demikian pula pada tahun 2024 tidak terdapat temuan Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat terhadap Inspektorat. Sehingga tidak terdapat tindak lanjut hasil audit pada Inspektorat yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Sehingga persentase tindak lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat pada tahun 2024 berdasarkan formula pada manual IKU yaitu $(100/100) \times 100\% = 100\%$. Diperoleh capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024 Inspektorat merencanakan dan telah melaksanakan 13 IKU dengan hasil capaian, kendala serta rekomendasi yang telah disampaikan di atas, sedangkan pada tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat terbaru yang ditandatangani pada Juli Tahun 2025 dan penyesuaian pada Rancangan Strategis BKN tahun 2025-2029 maka Inspektorat merencanakan 11 IKK untuk dilaksanakan dan dicapai sepanjang tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Target Kinerja 2025

Pada dasarnya Rencana Kerja Inspektorat menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat selama 1 (satu) tahun. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2025, dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan sasaran dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Target kinerja setiap kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja dengan tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Sebagai upaya mewujudkan sasaran tersebut dan dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi Inspektorat, perlu didukung dengan perencanaan program yang matang. Di dalam operasionalnya kemudian sasaran tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai upaya mewujudkan tujuan organisasi. Target Kinerja Inspektorat tahun 2025 dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan (PKPT) Tahun 2025 dan juga Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Berdasarkan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, Inspektorat menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan turunan dari masing-masing Sasaran Kegiatan yang direncanakan akan dicapai dengan target dan anggaran beserta dasar penetapan target sebagai berikut:

SK 1. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN

IKK 1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
87	87

Sesuai dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan yang terdiri dari unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya tarif, produk spesifikasi, jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta unsur sarana dan prasarana.

Berdasarkan realisasi capaian tahun 2023 diperoleh nilai 88,14 sedangkan realisasi capaian tahun 2024 diperoleh nilai 87,07 dimana mengalami penurunan capaian sebesar 1,07. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 sehingga target IKK 1 pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 87 agar *achievable* dengan tren kenaikan nilai sebesar 0.5 setiap tahunnya sepanjang periode Renstra 2025-2029.

Formula yang digunakan untuk mencapai realisasi target yaitu survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat

terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Kegiatan pendukung yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target yang ditetapkan yaitu pelaksanaan survei penilaian indeks kepuasan layanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan setiap semester dalam satu tahun dengan target output dua Laporan.

IKK 2. Skor Evaluasi AKIP Inspektorat

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
73	73

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang

ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN tahun 2024 berdasarkan penilaian Tim Evaluator yang disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat BKN Nomor 071/AI.03/LHE/H/2024 tanggal 26 Agustus 2024, memperoleh nilai sebesar 71,25 (tujuh puluh satu koma dua puluh lima) dengan kategori BB dari target nilai 75 (tujuh puluh lima) sehingga masih belum tercapai dari target Renja 2024. Dengan mempertimbangkan realisasi selama periode renstra 2020-2024 dimana hanya pada tahun 2022 berhasil mendapat nilai 75,80 yaitu di atas target nilai 75 maka target IKK 2 pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 73 agar *achievable* dengan tren kenaikan nilai sebesar 0.5 setiap tahunnya sepanjang periode Renstra 2025-2029. Formula yang digunakan yaitu hasil penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.

Kegiatan pendukung yang dilakukan dalam upaya mencapai target yang ditetapkan diantaranya yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja BKN Tahun 2025;
2. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2024;
3. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Triwulan Tahun 2025.

IKK 3. Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
100	100

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Inspektorat BKN berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Rencana Aksi RB mencakup berbagai inisiatif peningkatan kinerja organisasi, penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan integritas aparatur.

Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi RB dilakukan secara berkala untuk menilai capaian setiap kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dengan jumlah seluruh kegiatan yang direncanakan dalam periode pelaporan.

Rumus perhitungan:

$$N = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- **N** = Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB Inspektorat
- **A** = Jumlah rencana aksi RB yang telah dilaksanakan
- **B** = Jumlah rencana aksi RB yang direncanakan

Pada Tahun 2025, tim Reformasi Birokrasi Inspektorat menargetkan capaian 100% dengan rencana kegiatan pendukungnya adalah:

1. Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi;
2. Membuat konten/flyer terkait pengendalian gratifikasi hari raya di lingkungan BKN;

3. Penyusunan draf revisi Keputusan Kepala BKN tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan BKN;
4. Penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan Tahun 2025.

IKK 4. Persentase *Service Level Agreement* (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Inspektorat

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
90	90

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata Kelola administrasi dan pelayanan internal di lingkungan Inspektorat BKN, dilakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan penyelesaian surat masuk berdasarkan *Service Level Agreement* (SLA) dengan target waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap surat yang diterima oleh Inspektorat BKN dapat ditindaklanjuti dan diberikan jawaban secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah surat yang dijawab dalam waktu ≤ 5 hari terhadap total surat yang diterima pada periode tertentu.

Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur melalui Persentase SLA Jawaban Surat Maksimal 5 Hari, dengan rumus:

$$\text{Persentase SLA} = \frac{\text{Jumlah surat yang dijawab } \leq 5 \text{ hari}}{\text{Total surat yang diterima}} \times 100\%$$

Target kinerja ditetapkan sebesar 90%, yang mencerminkan komitmen Inspektorat BKN terhadap ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi. Hasil pemantauan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan proses bisnis, penataan alur disposisi surat, serta optimalisasi sistem persuratan elektronik agar respon terhadap surat dapat dilakukan secara lebih efisien dan akuntabel. IKK ini merupakan IKK yang baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak memiliki *baseline* dari capaian tahun sebelumnya dalam menentukan target capaian.

SK 2. Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah
IKK 5. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Inspektorat

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
100	100

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan digitalisasi birokrasi serta penguatan akuntabilitas kinerja aparatur, Inspektorat BKN melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan pegawai dalam pengisian kinerja harian melalui aplikasi e-Kinerja. Kegiatan ini sejalan dengan Nota Dinas Sekretaris Utama BKN Nomor 235/KP.13.01/ND/A/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pengawasan Pengisian Kinerja Harian Pegawai, yang menginstruksikan setiap pimpinan unit kerja untuk melakukan pemantauan berkala terhadap pelaporan kinerja harian pegawai melalui akun pimpinan dan/atau pejabat penilai kinerja.

Pemantauan dilakukan melalui fitur Dashboard Harian Bawahan dan menu Pemantauan dan Evaluasi pada aplikasi e-Kinerja. Setiap unit kerja diwajibkan menyusun rekapitulasi hasil pengisian kinerja harian pegawai secara periodik dan menyampaikannya kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja individu.

Di lingkungan Inspektorat BKN, pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan memantau tingkat keterisian laporan kinerja harian seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, guna memastikan seluruh pegawai melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan. Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang menginput kinerja harian pada aplikasi dibandingkan dengan total pegawai di lingkungan Inspektorat.

Data hasil pemantauan ini menjadi dasar dalam penilaian disiplin dan akuntabilitas kinerja pegawai, sekaligus sebagai bahan evaluasi efektivitas penerapan sistem e-Kinerja. Semakin tinggi persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian mencerminkan semakin baiknya kesadaran dan kepatuhan terhadap tata kelola kinerja berbasis elektronik di Inspektorat. Formula yang digunakan yaitu:

Formula:

Membandingkan antara jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian dengan jumlah pegawai di unit kerja.

$$N = A/B \times 100\%$$

N = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat

A = Jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat

B = Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat

Kegiatan pendukung yang direncanakan yaitu melaksanakan pemantauan rekapitulasi pengisian kinerja harian Inspektorat Periodik Tahun 2025.

SK 3. Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN
IKK 6. Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
89.40	89.40

Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan bahwa Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan audit meliputi audit kinerja serta audit dengan tujuan tertentu.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu meliputi reviu laporan keuangan, reviu rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), reviu rencana kebutuhan barang milik negara, serta reviu lainnya.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan BKN.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan meliputi pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan maupun pemantauan lain yang tidak termasuk dalam pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi, asistensi, maupun konsultasi. Dari antara kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat menghasilkan rekomendasi dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala oleh Inspektorat yaitu pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan BKN.

Dikarenakan IKK 3 merupakan IKK baru pada periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi capaian dari periode sebelumnya.

Adapun target IKK 3 ditetapkan berdasarkan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat tahun pemantauan 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 diperoleh realisasi 96,20% dan pada tahun 2024 diperoleh 87,50% sehingga mengalami penurunan sebesar 8,70%. Dari capaian tahun 2024 maka dibuat proyeksi nilai meningkat untuk 5 tahun ke depan secara merata dengan target pada tahun 2029 sebesar 97%. Peningkatan total yang dibutuhkan untuk 5 tahun yaitu $97,00\% (2029) - 87,50\% (2024) = 9,50\%$. Sehingga peningkatan tahunan yaitu $9,50\% / 5 \text{ tahun} = 1,90\% \text{ per tahun}$. Maka untuk tahun target tahun 2025 adalah $87,50\% + 1,90\% = 89,40\%$. Formula yang digunakan adalah:

Formula:

$(N/A) \times 100\%$

N = jumlah rekomendasi pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan sesuai (audit, reviu dan evaluasi AKIP)

A = Total rekomendasi pengawasan internal (audit, reviu dan evaluasi implementasi AKIP)

Kegiatan pendukung yang dilakukan dalam upaya mencapai target yang ditetapkan diantaranya yaitu:

1. Koordinasi dan internalisasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi;
2. Reviu anggaran;
3. Reviu laporan keuangan;
4. Reviu perencanaan kebutuhan barang milik negara;
5. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
6. Penyelenggaraan pemantauan, pembinaan dan pendampingan;
7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP TA 2024;
8. Evaluasi AKIP unit kerja dan Kantor Regional TA 2024.

IKK 7. Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
4	4

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluator BPKP, menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,351 dan pada tahun 2024 berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,520. Sehingga berdasarkan skor yang diperoleh terdapat kenaikan nilai SPIP dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar

0,169 dan tetap berada pada level 3. Terkait dengan Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN, Inspektorat berperan sebagai Tim Penjamin Kualitas berkoordinasi dengan Tim Asesor dan melakukan pengujian terhadap hasil penilaian mandiri Level Maturitas SPIP.

Sehingga ditetapkan target tahun 2025 untuk hasil penilaian penjaminan kualitas level maturitas SPIP BKN berada level 4 dengan sumber data berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari tim Penjaminan Kualitas (PK) SPIP BKN.

Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung ketercapaian target yang ditetapkan yaitu:

- 1 Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BKN;
- 2 Internalisasi Penyelenggaraan SPIP;
- 3 Internalisasi Pengendalian Gratifikasi;
- 4 Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.

IKK 8. Level Kapabilitas APIP

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
3	3

Berdasarkan surat dari BPKP Nomor: PE.09.03/LHP195/D205/2/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Badan Kepegawaian Negara diperoleh kesimpulan hasil evaluasi bahwa Kapabilitas APIP pada tahun 2023 maupun 2024 telah

berada pada “Level 3” atau *delivered* dengan skor “3,44” untuk seluruh elemen kapabilitas APIP. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 3 dan realisasi kinerja yang diperoleh berada pada level 3. Sehingga berdasarkan capaian tersebut maka ditetapkan target level kapabilitas APIP tahun 2025 berada pada level 3 dengan proyeksi kenaikan ditargetkan pada tahun 2028 dan 2029 berada pada level 4.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu:

1. Internalisasi penilaian mandiri kapabilitas APIP;
2. *Workshop* dalam rangka peningkatan kapabilitas auditor internal;
3. Pendidikan dan pelatihan SDM Inspektorat;
4. Penilaian Kapabilitas APIP Badan Kepegawaian Negara;

IKK 9. Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
1	1

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan.

Adapun inovasi yang menjadi target Inspektorat pada tahun 2025 adalah penyampaian usulan draf Keputusan Kepala terkait pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN atas dasar

evaluasi Kebijakan Keputusan Kepala 326.1 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKN.

Formula yang digunakan dalam pengukuran adalah jumlah paket inovasi = total paket inovasi yang dihasilkan di lingkungan Inspektorat BKN. Kegiatan pendukung yang akan dilakukan adalah penyampaian usulan draf pedoman penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKN atas dasar evaluasi Kebijakan Kepka 326.1 tahun 2023.

SK.4 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN

IKK 10. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
99	99

Pada tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana aksi dengan akumulasi realisasi anggaran dari pagu anggaran setelah blokir yaitu berada pada persentase 99,92% sebesar Rp 1.016.696.514 (satu milyar enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp803.486 (delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) atau 0,08%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta transportasi lokal.

Dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 pada 98,29% terdapat peningkatan persentase realisasi anggaran tahun 2024 menjadi 99,92% (naik 1,63). Secara keseluruhan anggaran dapat terserap dengan optimal karena kegiatan di unit kerja dimonitoring secara berkala dan apabila

terdapat perubahan kegiatan pada tahun berjalan maka pengelola segera mengajukan revisi POK sehingga penyerapan bisa dimaksimalkan.

Maka berdasarkan capaian tersebut dan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi ditetapkan target realisasi tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebesar 99% dengan anggaran Inspektorat tahun 2025 sebesar Rp1.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Formula yang digunakan dalam pengukuran adalah:

Formula:

Membandingkan antara jumlah serapan anggaran di Inspektorat dengan jumlah pagu anggaran Inspektorat

$$N = A/B \times 100\%$$

N = Persentase realisasi penyerapan anggaran di lingkungan Inspektorat

A = Jumlah serapan anggaran di lingkungan Inspektorat

B = Jumlah pagu anggaran di lingkungan Inspektorat

Adapun kegiatan pendukung yang akan dilakukan sepanjang tahun 2025 yaitu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan Inspektorat yang dilakukan dan disampaikan setiap bulan secara berkala.

IKK 11. Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Inspektorat

TARGET 2025 INSPEKTORAT	
RENSTRA	RENJA
0	0

Tidak terdapat temuan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Demikian pula pada tahun 2024 tidak terdapat temuan Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat terhadap Inspektorat. Sehingga tidak terdapat tindak lanjut hasil audit pada Inspektorat yang

belum ditindaklanjuti pada tahun 2024. Realisasi persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat pada tahun 2024 yaitu 100% begitu juga dengan tahun lainnya pada periode renstra 2020-2024 dengan target 100% berhasil mencapai realisasi 100%. Dengan pertimbangan berhasil tercapainya maka ditetapkan target IKK 7 tahun 2025 yaitu 100%.

Terdapat penyesuaian formula IKK untuk menghitung persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat untuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025. Pada manual IKU tahun 2024 menggunakan formula:

$$(N / A) \times 100\%$$

N : Jumlah melaksanakan tindak lanjut temuan hasil Audit /
Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat.

A : Jumlah temuan hasil pengawasan BPK/BPKP/Inspektorat
BKN atas Inspektorat

Sedangkan pada manual IKK tahun 2025 menggunakan formula:

$$N = A/B \times 100\%$$

N : Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat
atas kegiatan tahun 2025 di lingkungan Inspektorat

A : Jumlah temuan Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas
kegiatan tahun 2025

B : Jumlah kegiatan tahun 2025 yang diaudit oleh BPK/Inspektorat
atas Inspektorat

3.1.1. Program Kerja Pengawasan Tahun 2025

Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2025 tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.

Program Kerja Pengawasan Tahunan TA. 2025

No	Jenis Audit	Waktu Pelaksanaan	
		Mulai	Selesai
1	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2024	6 Januari 2025	7 Maret 2025
2	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2024	6 Januari 2025	7 Maret 2025
3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2024	6 Januari 2025	7 Maret 2025
4	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal dan Puspenkom TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
5	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN DKI Jakarta, Kanreg X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
6	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kanreg III BKN Bandung, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Deputi Sinka dan Sekretariat BP ASN TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
7	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XIV BKN Manokwari dan PPSS TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
8	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
9	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kanreg II BKN Surabaya, Pusbangpeg ASN,	17 Maret 2025	30 Juni 2025

No	Jenis Audit	Waktu Pelaksanaan	
		Mulai	Selesai
	Inspektorat dan Deputi PMK TA 2024		
10	Reviu LK Semester I TA 2025	30 Juni 2025	29 Agustus 2025
11	Reviu RKA KL TA 2026	30 Juni 2025	28 November 2025
12	Reviu LK TWIII TA 2025	29 September 2025	28 November 2025
13	Reviu RKBMN TA 2026	29 September 2025	28 November 2025
14	Evaluasi AKIP Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal dan Puspenkom	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
15	Evaluasi AKIP Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN DKI Jakarta, Kanreg X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
16	Evaluasi AKIP Kanreg III BKN Bandung, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Deputi Sinka dan Sekretariat BP ASN	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
17	Evaluasi AKIP Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XIV BKN Manokwari dan PPSS	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
18	Evaluasi AKIP Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
19	Evaluasi AKIP Kanreg II BKN Surabaya, Pusbangpeg ASN, Inspektorat dan Deputi PMK	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
20	Audit Operasional Dir. Wasdal 1 periode Jan-Sept 2025	29 September 2025	28 November 2025
21	Audit Operasional Dit. Pensiun periode Januari s.d September 2025	29 September 2025	28 November 2025

No	Jenis Audit	Waktu Pelaksanaan	
		Mulai	Selesai
22	Audit Operasional Dit. Inti Periode Januari s.d September 2025	29 September 2025	28 November 2025
23	Audit Operasional PPSS Periode Januari s.d September 2025	29 September 2025	28 November 2025
24	Audit Operasional Biro SDM Periode Januari s.d September 2025	29 September 2025	28 November 2025
25	Audit Operasional Dit. Jabatan ASN periode Januari s.d September 2024	29 September 2025	28 November 2025
26	Penilaian Mandiri RB	02 Januari 2025	31 Desember 2025
27	Penilaian Mandiri ZI	02 Januari 2025	31 Desember 2025
28	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	02 Januari 2025	31 Desember 2025
29	Pengawasan MRI	02 Januari 2025	31 Desember 2025
30	PM Kapabilitas APIP	02 Januari 2025	31 Desember 2025
31	RB inspektorat	02 Januari 2025	31 Desember 2025
32	LHKASN	02 Januari 2025	April 2025
33	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)	02 Januari 2025	31 Desember 2025
34	Reviu PAPBJ	02 Januari 2025	31 Desember 2025
35	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2025	02 Januari 2025	31 Desember 2025
36	WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai	02 Januari 2025	31 Desember 2025

No	Jenis Audit	Waktu Pelaksanaan	
		Mulai	Selesai
37	Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan	02 Januari 2025	31 Desember 2025
38	Tim UPR Inspektorat	02 Januari 2025	31 Desember 2025
39	Tim P3DN	02 Januari 2025	31 Desember 2025
40	Tim Pemantauan Tindaklanjuti Rekomendasi Inspektorat	02 Januari 2025	31 Desember 2025
41	SPI KPK	02 Januari 2025	31 Desember 2025
42	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN	02 Januari 2025	31 Desember 2025
43	Revisi POK Tahun 2025	02 Januari 2025	31 Desember 2025
44	Revisi RKBMN Tahun 2025	02 Januari 2025	31 Desember 2025
45	Tim Manajemen Pengawasan PNB	02 Januari 2025	31 Desember 2025
46	Audit SPBE	03 Maret 2025	29 Agustus 2025
47	Tim Strategis Nasional KPK	03 Maret 2025	29 Agustus 2025

3.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

Rencana kegiatan yang didasarkan pada aktivitas yang wajib dilaksanakan dan sebagian dibiayai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKN Tahun 2025, yang dijabarkan dalam Pedoman Operasional Kegiatan (POK) sehingga dalam dijadikan tolok ukur output

dari setiap kegiatan. Setiap kegiatan dilaksanakan oleh setiap pegawai dan secara menyeluruh menuju tercapainya sasaran kerja Inspektorat.

Tabel. 6

Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun 2025

Kode KRO/RO	Program Kegiatan (output dan Rincian Kegiatan)	Pagu Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen		Rp 1.250.000.000
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		Rp 1.250.000.000
Layanan Reformasi Kinerja Pelaksanaan		
1	Koordinasi dan Internalisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi	Rp. 175.500.000
Layanan Audit Internal Pelaksanaan		
1	Reviu Anggaran	Rp. 6.075.000
2	Reviu Laporan Keuangan	Rp. 6.075.000
3	Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	Rp. 6.075.000
4	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	Rp. 741.613.000
5	Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan	Rp. 229.322.000
6	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Rp. 19.440.000
7	Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)	Rp. 12.080.000
8	Internalisasi Pengendalian Gratifikasi	Rp. 8.100.000
9	Internalisasi Penyelenggaraan SPIP	Rp. 12.080.000
10	Workshop dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal	Rp. 8.640.000

11	Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat	Rp.	25.000.000
Anggaran Inspektorat Tahun 2025		Rp.	1.250.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja tahunan merupakan gambaran secara jelas dan terinci dari kegiatan program tahunan dengan menyajikan tingkat capaian sasaran dari masing-masing kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Keberhasilan peningkatan kinerja serta terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien setiap unit kerja di lingkungan BKN merupakan tujuan akhir dari BKN. Dikomunikasikannya Rencana Kerja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur.

Sebagai dokumen dan komponen dari siklus AKIP, Rencana Kinerja Inspektorat tahun 2025 merupakan salah satu bagian dari Renstra di lingkungan Inspektorat. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 mengacu pada sasaran strategis dan target yang telah ditentukan pada Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029. Seluruh kegiatan Inspektorat yang direncanakan diharapkan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat yang juga secara langsung berkontribusi demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis BKN.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2026
3. POK Cetakan ke-4



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Herdi
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zudan Arif Fakrulloh
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Juli 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Zudan Arif Fakrulloh
NIP. 196908241999031001

Pihak Pertama
Inspektur

Dedi Herdi
NIP. 196511041992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	IKK.1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87
		IKK.2	Skor Evaluasi AKIP Inspektorat	73
		IKK.3	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat	100
		IKK.4	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 5 Hari di Inspektorat	90
SK.2	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah	IKK.5	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di Inspektorat	100
SK.3	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	IKK.6	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang di tindaklanjuti	89.4
		IKK.7	Hasil penilaian penjamin kualitas level maturitas SPIP BKN	4
		IKK.8	Level Kapabilitas APIP	3
		IKK.9	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat	1
SK.4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	IKK.10	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Inspektorat	99
		IKK.11	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas Kegiatan Tahun 2025 di Inspektorat	0

Kode KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi
3635	Pengelolaan Risiko, Pengenalian, dan Pengawasan Internal	Rp1.250.000.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
961	Layanan Reformasi Kinerja	Rp175.500.000
965	Layanan Audit Internal	Rp1.074.500.000
TOTAL PAGU		Rp1.250.000.000

Jakarta, 29 Juli 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian Negara



Zudan Arif Fakrulloh
NIP. 196908241999031001

Pihak Pertama
Inspektur



Dedi Herdi
NIP. 196511041992031001

Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Audit 2025 Inspektorat Badan Kepegawaian Negara																										
Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran								Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran									
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
1	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Riyantie Ari R. Dyah, Akhmar, Esra, Melly, Syafria, Irma, Jonathan, Vivi, Renaldi, Desi, Farida	Dalnis Ketua Tim Anggota	6,075,000	1 Laporan	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2024	Mandatory	6 Januari 2025	7 Maret 2025	Riyantie Ari R. Dyah, Akhmar, Esra, Melly, Syafria, Irma, Jonathan, Vivi, Renaldi, Desi, Farida, Ismi, Margo	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	1 Laporan		Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Riyantie Ari R. Dyah, Akhmar, Esra, Melly, Syafria, Irma, Jonathan, Vivi, Renaldi, Desi, Farida, Ismi, Margo	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	1 Laporan	
2	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Fita R. Arie P. Ayu, Hoven, Citra, Bayu, Angga, Linda, Pandu, Zahwa,	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2024	Mandatory	6 Januari 2025	7 Maret 2025	Fita R. Arie P. Ayu, Hoven, Citra, Bayu, Angga, Linda, Pandu, Zahwa, Okdi, Reni	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Fita R. Arie P. Rahayu, Hoven, Citra, Bayu, Angga, Nurlinda, Pandu, Zahwa, Okdi, Reni	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Arniz Novita Fitri D, Rina, Almira, Biayu, Fathur, Ria Okta	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2024	Mandatory	6 Januari 2025	7 Maret 2025	Arniz Novita Fitri D, Rina, Almira, Biayu, Fathur, Ria Okta, Fandi	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2024	Mandatory	06 Januari 2025	7 Maret 2025	Arniz Novita Fitri D., Rina, Almira, Biayu, Fathur, Ria Okta, Fandy	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
4	Audit Operasional Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Periode April-Desember TA 2024	Tinggi	3 Maret 2025	16 Mei 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar	Dalnis Ketua Tim Anggota	568,133,000	1 Laporan	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	1 Laporan	Audit Operasional TA 2024 tidak dapat dilaksanakan karena Dokumen Pertanggungjawaban untuk seluruh Kantor Regional sudah di minta oleh BPK dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan BKN TA 2024.	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	3 Laporan	Audit Operasional TA 2024 tidak dapat dilaksanakan karena Dokumen Pertanggungjawaban untuk seluruh Kantor Regional sudah di minta oleh BPK dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan BKN TA 2024
5	Audit Operasional Kantor Regional IV BKN Makassar Periode April - Desember TA 2024	Tinggi	3 Maret 2025	16 Mei 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Riyantie Syafria/Rina Rina/Syafria, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		4 Laporan	
6	Audit Operasional Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Periode April-Desember TA 2024	Tinggi	3 Maret 2025	16 Mei 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, dan Deputi Sinka TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, dan Deputi Sinka TA 2024	Mandatory	17 Maret 2025	30 Juni 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandy, Irma, Zahwa	Dalnis Ketua Tim Anggota		3 Laporan	

[illegible]

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran									Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran								
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
16	Reviu LK Semester I TA 2025	Mandatory	30 Juni 2025	29 Agustus 2025	Riyantie Fita Ari Rahma, Rina, Akhmar, Fitri D, Hoven, Okdi, Desi, Ismi, Almira, Rey, Margo, Dyah, Citra, Linda, Zahwa, Fathur	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Reviu LK Semester I TA 2025	Mandatory	30 Juni 2025	29 Agustus 2025	Riyantie Fita Ari Rahma, Rina, Akhmar, Fitri D, Hoven, Okdi, Desi, Ismi, Almira, Rey, Margo, Dyah, Citra, Linda, Zahwa, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Reviu LK Semester I TA 2025	Mandatory	30 Juni 2025	29 Agustus 2025	Riyantie Fita R. Ari Rahma, Dyah, Rina, Akhmar, Okdi, Desi, Ismi, Almira, Renaldi, Margo, Citra, Linda, Zahwa, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	A.n Fitri Dwijayanti cuti besar A.n Mar'an Hoven alih jabatan dan mutasi
17	Reviu RKA KL TA 2026	Mandatory	30 Juni 2025	28 November 2025	Amiz Novita Melly Arie P, Ayu, Irma, Esra, Farida, Ria Okta, Fandi, Pandu,Syafria, Angga, Vivi, Jonathan, Biayu, Reni, Bayu	Dalnis KT 1 KT 2 AT	6,075.000	1 Laporan	Reviu RKA KL TA 2026	Mandatory	30 Juni 2025	28 November 2025	Amiz Novita Melly Arie P, Ayu, Irma, Esra, Farida, Ria Okta, Fandi, Pandu,Syafria, Angga, Vivi, Jonathan, Biayu, Reni, Bayu	Dalnis KT 1 KT 2 Anggota	0	1 Laporan		Reviu RKA KL TA 2026	Mandatory	30 Juni 2025	28 November 2025	Amiz Novita Melly Nurlinda, Rahayu, Irma, Esra, Farida, Ria Okta, Fandy, Pandu, Syafria, Angga, Vivi, Jonathan, Biayu, Reni, Bayu	Dalnis Ketua Tim 1 & 2 Anggota	0	1 Laporan	
18	Reviu LK TWIII TA 2025	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Riyantie Fita Akhmar, Rina, Fitri D, Okdi, Desi, Rey, Fathur	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Reviu LK TWIII TA 2025	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Riyantie Fita Akhmar, Rina, Fitri D, Okdi, Desi, Rey, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan		Reviu LK Triwulan III TA 2025	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Riyantie Fita R. Akhmar, Rina, Fitri D., Okdi, Desi, Renaldi, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
19	Reviu RKBMN TA 2027	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Ari Rahma Hoven Dyah, Margo, Mira, Zahwa, Citra, Ismi, Linda	Dalnis KT Anggota	6,075.000	1 Laporan	Reviu RKBMN TA 2027	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Ari Rahma Hoven Dyah, Margo, Mira, Zahwa, Citra, Ismi, Linda	Dalnis KT Anggota	0	1 Laporan		Reviu RKBMN TA 2027	Mandatory	29 September 2025	28 November 2025	Ari Rahma Margo Dyah, Mira, Zahwa, Citra, Ismi	Dalnis Ketua Tim Anggota	0	1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi
20	Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal dan Puspenkom	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Dyah Angga Farida, Ismi ,Citra, Akhmar,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal dan Puspenkom	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Dyah Angga Farida, Ismi , Citra, Akhmar,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, dan Puspenkom	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar,	Dalnis Ketua Tim Anggota		4 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan evaluasi karena adanya perubahan SOTK dan kesiapan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
21	Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Riyantie Syafria/Rina a Rina/Syafria, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Riyantie Syafria/Rina Rina/Syafria, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional IV BKN Makassar, Kantor Regional V BKN DKI Jakarta, Kantor Regional X BKN Denpasar, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		4 Laporan	

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran									Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran								
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
22	Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Deputi Sinka dan Sekretariat BP ASN	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Deputi Sinka dan Sekretariat BP ASN	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, dan Sekretariat BP ASN	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Ari Rahma Okdi, Fandi, Irma, Zahwa	Ketua Tim Anggota		4 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan evaluasi karena adanya perubahan SOTK dan kesiapan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan A.n Hoven alih jabatan dan mutasi
23	Evaluasi AKIP Kantor Regional VII BKN Palembang, Kantor Regional XI BKN Manado, Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan PPSS	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Arniz Arie P Margo, Reni, Ria Okta, Ayu,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional VII BKN Palembang, Kantor Regional XI BKN Manado, Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan PPSS	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Arniz Arie P Margo, Reni, Ria Okta, Ayu,	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional VII BKN Palembang, Kantor Regional XI BKN Manado, Kantor Regional XIV BKN Manokwari , dan Pusat Pengembangan n Sistem Rekrutmen	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Arniz Margo, Reni, Ria Okta, Rahayu	Ketua Tim Anggota		4 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan evaluasi karena adanya perubahan SOTK dan kesiapan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan A.n Arie Puspiniti promosi jabatan
24	Evaluasi AKIP Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Fita R Fitri D/Vivi Vivi/Fitri D, Almira, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Fita R Fitri D/Vivi Vivi/Fitri D, Almira, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Kantor Regional VI BKN Medan, Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Fita R. Vivi, Almira, Pandu, Bayu	Ketua Tim Anggota		4 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan evaluasi karena adanya perubahan SOTK dan kesiapan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
25	Evaluasi AKIP Kantor Regional II BKN Surabaya, Pusbangpeg ASN, Inspektorat dan Deputi PMK	Mandatory	4 Agustus 2025	03 Oktober 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Rey	Dalnis KT Anggota		4 Laporan	Evaluasi AKIP Kantor Regional II BKN Surabaya, Pusbangpeg ASN, Inspektorat dan Deputi PMK	Mandatory	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Rey	Dalnis KT Anggota		4 Laporan		Evaluasi AKIP Kantor Regional II BKN Surabaya, Pusbang SDM, Inspektorat dan Deputi Pembinaan Penyelenggara an Manajemen ASN	Mandatory	11 Agustus 2025	3 Oktober 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Renaldi	Dalnis Ketua Tim Anggota		4 Laporan	
26	Audit Operasional Dir. Wasdal 1 periode Jan-Sept 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar,	Dalnis KT Anggota		1 LHA									Tidak dapat dilaksanakan audit operasional pada Unit Kerja level JPT Pratama di Kantor Pusat karena adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan alokasi anggaran setiap unit kerja tersebut tidak ada.	Audit Operasional Kantor Regional IX BKN Jayapura Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Dyah Angga Farida, Ismi, Citra, Akhmar	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Terdapat relaksasi blokir efisiensi anggaran sehingga dapat dilaksanakan audit operasional ke Kantor Regional yang mempunyai potensi risiko tinggi dalam pengelolaan anggaran BA BUN.
27	Audit Operasional Dit. Pensiun periode Januari s.d September 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis KT Anggota		1 LHA										Audit Operasional Kantor Regional IV BKN Makassar Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Riyantie Syafria Rina, Biayu, Jonathan, Fathur	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
28	Audit Operasional Dit. Inti Periode Januari s.d September 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Ari Rahma Hoven Okdi, Fandi, Irma, Zahwa,	Dalnis KT Anggota		1 LHA										Audit Operasional Kantor Regional III BKN Bandung Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Ari Rahma Okdi Fandy, Irma, Zahwa	Ketua Tim Anggota		1 Laporan	

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran								Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran									
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
29	Audit Operasional PPSS Periode Januari s.d September 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Arniz Arie P Margo, Reni, Ria Okta, Ayu,	Dalnis KT Anggota		1 LHA									Tidak dapat dilaksanakan audit operasional pada Unit Kerja level JPT Pratama di Kantor Pusat karena adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan alokasi anggaran setiap unit kerja tersebut tidak ada.	Audit Operasional Kantor Regional XIV BKN Manokwari Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Arniz Margo Reni, Ria Okta, Rahayu	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Terdapat relaksasi blokir efisiensi anggaran sehingga dapat dilaksanakan audit operasional ke Kantor Regional yang mempunyai potensi risiko tinggi dalam pengelolaan anggaran BA BUN.
30	Audit Operasional Biro SDM Periode Januari s.d September 2025	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Fita R Fitri D Vivi, Almira, Pandu, Bayu	Dalnis KT Anggota		1 LHA										Audit Operasional Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Fita R. Fitri D. Vivi, Almira, Pandu, Bayu	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
31	Audit Operasional Dit. Jabatan ASN periode Januari s.d September 2024	Tinggi	29 September 2025	28 November 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Rey	Dalnis KT Anggota		1 LHA										Audit Operasional Pusbang SDM Periode Januari s.d Agustus 2025	Tinggi	01 Oktober 2025	30 November 2025	Novita Melly Nurlinda, Esra, Desi, Renaldi	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	
32	Penilaian Mandiri RB		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arie P Almira Ismi Farida Ayu Jonathan Bayu	Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil	320,000,000	1 Laporan	Penilaian Mandiri RB		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Arie P Almira Ayu Jonathan Bayu	Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil	0	1 Laporan		Penilaian Mandiri RB		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Almira Ismi Farida Rahayu Jonathan Bayu	Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil	0	1 Laporan	
33	Penilaian Mandiri ZI		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fitri D Angga Pandu Ismi Ria Okta Margo Budi Harvanto	Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Kasubhag TU		1 Laporan	Penilaian Mandiri ZI		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Fitri D Angga Pandu Ismi Ria Okta Margo Budi Harvanto	Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Kasubhag TU		1 Laporan		Penilaian Mandiri ZI		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fitri D. Angga Pandu Ismi Ria Okta Margo Budi	Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia TU		1 Laporan	
34	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Syafria Vivi Okdiani Renaldi Biayu Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Syafria Vivi Okdiani Renaldi Biayu Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan		Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Syafria Vivi Okdiani Renaldi Biayu Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	
35	Pengawasan MRI		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Arie P Mar'an Hoven Okdiani Irma Ayu Citra Jonathan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan	Pengawasan MRI		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Arie P Mar'an Hoven Okdiani Irma Ayu Citra Jonathan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan		Pengawasan MRI		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Okdiani Irma Rahayu Citra Jonathan	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan	
36	PM Kapabilitas APIP		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Rina Esra Almira Bayu Zahwa Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	PM Kapabilitas APIP		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Rina Esra Almira Bayu Zahwa Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan		PM Kapabilitas APIP		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Rina Esra Almira Bayu Zahwa Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU		1 Laporan	
37	RB Inspektorat 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Angga Vivi Nurlinda Biayu Budi Farhan Friska	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU TU		1 Laporan	RB Inspektorat 2025		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Angga Vivi Nurlinda Biayu Budi Farhan Friska	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU TU		1 Laporan		RB Inspektorat 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Angga Vivi Nurlinda Biayu Budi Farhan Friska	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil TU TU TU		1 Laporan	
38	LHKASN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Angga Margo Reni	Auditor muda Auditor Penyelia Auditor Pertama		1 Laporan	LHKASN		2 Januari 2025	April 2025	Angga Margo Reni	Auditor muda Auditor Penyelia Auditor Pertama		1 Laporan		LHKASN		02 Januari 2025	April 2025	Angga Margo Reni	Auditor muda Auditor Penyelia Auditor Pertama		1 Laporan	
39	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Ari Rahma Pandu Citra Bayu	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Ari Rahma Pandu Citra Bayu	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan		BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Ari Rahma Pandu Citra Bayu	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Laporan	

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran									Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran								
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
40	Reviu PAPBJ		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Linda Esra Irma Fandi Akhmar	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir		1 Laporan	Reviu PAPBJ		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Linda Esra Irma Fandi Akhmar	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir		1 Laporan		Pendampingan Evaluasi Tata Kelola PBJ		01 Maret 2025	31 Desember 2025	Fita R. Nurlinda Esra Irma Fandy Akhmar Fathur	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir		1 Laporan	Berdasarkan Surat Tugas BPKP, tidak dilaksanakan reviu namun diganti dengan evaluasi tata kelola PBJ
41	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Arniz Melly Rina Vivi Citra Akhmar Pandu Irma Zahwa	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2025		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Arniz Melly Rina Vivi Citra Akhmar Pandu Irma Zahwa	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan		Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Arniz Melly Rina Vivi Citra Akhmar Pandu Irma Zahwa	Auditor Madya Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan	
42	WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Fitri Hoven Fandi Ismi Farhan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama TU		1 Laporan	WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Fitri Hoven Fandi I smi Farhan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama TU		1 Laporan		WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Fitri Fandy Ismi Farhan	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama TU		1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi
43	Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Syafria Esra Reni Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Terampil		1 Laporan	Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Syafria Esra Reni Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Novita Syafria Esra Reni Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	
44	Tim UPR Inspektorat		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Melly Rina Linda Margo Rey Budi Haryanto Farhan Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pertama TU TU TU		1 Laporan	Tim UPR Inspektorat		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Melly Rina Linda Margo Rey Dian Budi Farhan Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pertama TU TU TU TU		1 Laporan		Tim UPR Inspektorat		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Melly Rina Nurlinda Margo Renaldi Dian Budi Farhan Friska Dilla	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pertama TU TU TU TU		1 Laporan	
45	Tim P3DN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ria Akhmar Jonathan Fathur Desi	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama		1 Laporan	Tim P3DN		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Ria Akhmar Jonathan Fathur Desi	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama		1 Laporan		Tim P3DN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Riyantie Akhmar Jonathan Fathur Desi	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama		1 Laporan	
46	Tim Pemantauan Tindakanlajut Rekomendasi Inspektorat		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Almira Fathur Zahwa Okdi Desi	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	Tim Pemantauan Tindakanlajut Rekomendasi Inspektorat		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Almira Fathur Zahwa Okdi Desi	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		Tim Pemantauan Tindakanlajut Rekomendasi Inspektorat		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Almira Fathur Zahwa Okdi Desi	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	
47	SPI KPK		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Melly Angga Rey Biayu Farida Reni	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	SPI KPK		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita Melly Angga Rey Biayu Farida Reni	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		SPI KPK		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Fita R. Melly Angga Renaldi Biayu Farida Reni	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Terampil Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	
48	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Arie P Rahayu Syafria Farida	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Arie P Rahayu Syafria Farida	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Ari Rahma Rahayu Syafria Farida	Auditor Madya Auditor Mahir Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	An. Arie P promosi jabatan
49	Revisi POK Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Seluruh Auditor			1 Laporan	Revisi POK Tahun 2025		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Seluruh Auditor			1 Laporan		Revisi POK Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Dyah Fitri D. Anggota Tim sesuai Tim Reviu RKA KL TA 2025	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi An. Arie P promosi jabatan
50	Revisi RKBMN Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Hoven Anggota Tim sesuai Tim Reviu RKBMN TA 2025	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Revisi RKBMN Tahun 2025		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Hoven Anggota Tim sesuai Tim Reviu RKBMN TA 2025	Dalnis KT Anggota		1 Laporan		Revisi RKBMN Tahun 2025		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Syafria Anggota Tim sesuai Tim Reviu RKBMN TA 2025	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi

Semula									Revisi PKPT Setelah Adanya Efisiensi Anggaran									Revisi PKPT Setelah Adanya Relaksasi Anggaran								
No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan		Nama Auditor	Jabatan dalam Tim	Biaya (Rp)	Output	Alasan Perubahan
			Mulai	Selesai							Mulai	Selesai								Mulai	Selesai					
51	Tim Manajemen Pengawasan PNPB		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Hoven Fandi Ria Okta	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	Tim Manajemen Pengawasan PNPB		2 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Hoven Fandi Ria Okta	Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan		Tim Manajemem Pengawasan PNPB		02 Januari 2025	31 Desember 2025	Arniz Fandy Ria Okta	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	A.n Hoven alih jabatan dan mutasi
52									Audit SPBE		3 Maret 2025	29 Agustus 2025	Arniz Fitri Hoven Pandu Fandi Ria Okta Desi Jonathan	Dalnis KT Anggota		1 Laporan	Dalam rangka peningkatan Penilaian Indeks SPBE	Audit SPBE		01 Juli 2025	31 Desember 2025	Arniz Fitri D. Hoven, Pandu Fandy , Ria Okta Desi, Jonathan	Dalnis Ketua Tim Anggota		1 Laporan	Perubahan tanggal mulai pelaksanaan audit
53									Tim Strategis Nasional KPK		3 Maret 2025	29 Agustus 2025	Nurlinda Almira	Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	Sebagai upaya peningkatan Indeks SPI KPK	Tim Strategis Nasional KPK		03 Maret 2025	29 Agustus 2025	Nurlinda Almira	Auditor Pertama Auditor Pertama		1 Laporan	
54																		Tim Penyusun Inovasi		1 Agustus 2025	31 Desember 2025	Amiz Okdiani Irma Rahayu Citra Jonathan	Auditor Madya Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Mahir Auditor Terampil		1 Paket	Adanya perubahan IKK dalam Perjanjian Kinerja terbaru

Jakarta, 26 Agustus 2025
Mengetahui,
Kepala BKN

Inspektur

\$

#

POK INSPEKTORAT TA 2025 (CETAKAN KE-4)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(088)

(01)

(017220)

Rp. 1,250,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Badan Kepegawaian Negara

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen			1,250,000,000	
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			1,250,000,000	
3635.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	52.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,250,000,000	

3635.EBD.961	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
052	Layanan Reformasi Kinerja	2.0 Dokumen		175,500,000	
A	Pelaksanaan			175,500,000	U
	Koordinasi dan Internalisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi			175,500,000	
521211	Belanja Bahan			24,300,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [30 ORG x 10 KEG]	300.0 OK	57,000	17,100,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [30 ORG x 10 KL]	300.0 OK	24,000	7,200,000	*
522151	Belanja Jasa Profesi			5,400,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [3 ORG x 2 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			145,800,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Reformasi Kinerja [1 PKT]	1.0 PKT	145,800,000	145,800,000	*
3635.EBD.965	Layanan Audit Internal	50.0 Dokumen		1,074,500,000	
052	Pelaksanaan			1,074,500,000	U
A	Reviu Anggaran			6,075,000	
521211	Belanja Bahan			6,075,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	57,000	4,275,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	24,000	1,800,000	*
B	Reviu Laporan Keuangan			6,075,000	
521211	Belanja Bahan			6,075,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	57,000	4,275,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	24,000	1,800,000	*
C	Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara			6,075,000	
521211	Belanja Bahan			6,075,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	57,000	4,275,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [15 ORG x 5 KEG]	75.0 OK	24,000	1,800,000	*
D	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan			729,613,000	

POK INSPEKTORAT TA 2025 (CETAKAN KE-4)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(088)

(01)

(017220)

Rp. 1,250,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Badan Kepegawaian Negara

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
E	521211	Belanja Bahan		33,375,000	A	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
		- Biaya Makan Rapat Biasa [25 ORG x 15 KEG]	375.0 OK	57,000	21,375,000	*
		- Biaya Snack Rapat Biasa [25 ORG x 20 KEG]	500.0 OK	24,000	12,000,000	*
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		683,608,000	A	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
		- Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan dan Pengawasan [1 PKT]	1.0 PKT	683,608,000	683,608,000	*
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12,630,000	A	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
		- Uang Transport Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota [3 ORG x 13 KEG]	39.0 OK	170,000	6,630,000	*
		- Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 PKT]	1.0 PKT	6,000,000	6,000,000	*
		Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan			227,722,000	
	521211	Belanja Bahan		12,525,000		RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
		- Biaya Makan Rapat Biasa [25 ORG x 5 KEG]	125.0 OK	57,000	7,125,000	
		- Biaya Snack Rapat Biasa [25 ORG x 9 KEG]	225.0 OK	24,000	5,400,000	
F	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		215,197,000	A	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
		- Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan dan Pembinaan [1 PKT]	1.0 PKT	215,197,000	215,197,000	*
		Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko			19,440,000	
G	521211	Belanja Bahan		19,440,000	A	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
		- Biaya Makan Rapat Biasa [30 ORG x 8 KEG]	240.0 OK	57,000	13,680,000	*
		- Biaya Snack Rapat Biasa [30 ORG x 8 KEG]	240.0 OK	24,000	5,760,000	*
		Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)			12,080,000	
H	521211	Belanja Bahan		6,480,000	A	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
		- Biaya Makan Rapat Biasa [40 ORG x 2 KEG]	80.0 OK	57,000	4,560,000	*
		- Biaya Snack Rapat Biasa [40 ORG x 2 KEG]	80.0 OK	24,000	1,920,000	*
H	522151	Belanja Jasa Profesi		5,600,000	A	RM
		(KPPN.088-Jakarta III)				
		- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [1 ORG x 2 JAM]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	*
		- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [2 ORG x 2 JAM]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	*
		Internalisasi Pengendalian Gratifikasi			8,100,000	
	521211	Belanja Bahan		8,100,000	A	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Biaya Makan Rapat Biasa [100 ORG x 1 KEG]	100.0 OK	57,000	5,700,000	*	
	- Biaya Snack Rapat Biasa [100 ORG x 1 KEG]	100.0 OK	24,000	2,400,000	*	

POK INSPEKTORAT TA 2025 (CETAKAN KE-4)

KEMEN/LEMB

(088)

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

UNIT ORG

(01)

Badan Kepegawaian Negara

UNIT KERJA

(017220)

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA

ALOKASI

Rp.

1,250,000,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Internalisasi Penyelenggaraan SPIP			17,680,000	
	521211 Belanja Bahan			6,480,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [20 ORG x 4 KEG]	80.0 OK	57,000	4,560,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [20 ORG x 4 KEG]	80.0 OK	24,000	1,920,000	*
J	522151 Belanja Jasa Profesi			11,200,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon II) [2 ORG x 2 JAM]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	*
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [4 ORG x 2 JAM]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	*
	Workshop dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal			8,640,000	
J	521211 Belanja Bahan			3,240,000	A RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Biaya Makan Rapat Biasa [40 ORG x 1 KEG]	40.0 OK	57,000	2,280,000	*
	- Biaya Snack Rapat Biasa [40 ORG x 1 KEG]	40.0 OK	24,000	960,000	*
	522151 Belanja Jasa Profesi			5,400,000	A RM
K	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke Bawah) [3 ORG x 2 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	*
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat			33,000,000	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa			33,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan	1.0 PKT	33,000,000	33,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir